

**KECAMATAN DEKET**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**TAHUN ANGGARAN**  
**2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Deket Tahun 2024, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Deket Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Kecamatan Deket yang mengacu pada arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

LKJIP OPD Kecamatan Deket Tahun 2024, disusun mencakup uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Deket dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020.

Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan masing-masing komponen dalam Kecamatan Deket dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap tahun.

Disamping itu dalam penyusunan LKJIP OPD Kecamatan Deket Tahun 2024 dipergunakan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan Deket Tahun 2024.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam rangka mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk mendukung kinerja Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup LKJIP OPD Kecamatan Deket Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Deket, Januari 2025

CAMAT DEKET



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Data Umum Organisasi .....	3
1. Personil .....	4
2. Sarana Dan Prasarana .....	6
3. Pembiayaan .....	7
D. Sisitematika Penyajian LKJIP .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Rencana Strategis .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Sasaran Dan Indikator Kinerja .....	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	11
Program Dan Kegiatan .....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
1. Pencapaian Kinerja / Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2024 .....	18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d. Akhir Periode RPJMD .....	21
4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan.....	21
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	22
6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	23
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	23
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	26
A. Kesimpulan .....	26
B. Saran .....	26
Lampiran – Lampiran .....	28
• Matriks Rencana Strategik (RS).....	31
• Pengukuran Kinerja / Capaian Kinerja dari PK Tahun 2024 .....	39
• Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	42

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Deket Tahun 2024 merupakan Laporan Capaian Kinerja (**Performance Result**) selama 1 ( satu ) Tahun yakni Tahun 2024 yang mengacu pada rencana Strategik ( RENSTRA ) Kecamatan Deket Tahun 2023 – 2026. Berpijak dari Visi Kabupaten Lamongan :

### “Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah.
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi

Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja. Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, di perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yakni terdiri atas Sekretaris Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag sehingga untuk Penyusunan LKJIP Kecamatan Deket tersebut telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi dimaksud.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan **Good Governance**, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKJIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. LKJIP Kantor Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026

## C. DASAR HUKUM

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Inpres No : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;

4. Keputusan Kepala LAN – RI No : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala LAN – RI No : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) ;
7. Impres No : 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Surat Edaran Menpan No : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja ;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan ;

## **A. 2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud :**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Deket Tahun 2024, dimaksud sebagai laporan pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah Kantor Kecamatan Deket dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2024.

### **2. Tujuan :**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Deket Tahun 2024, adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa, bernegara, adapun guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disatu Kantor kerja serta dapat di pertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Deket merupakan dataran Terendah dengan ketinggian rata-rata + 2 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 7°3'54" Lintang Selatan dan 112°14'42" Bujur Timur, Luas Kecamatan Deket 40,05 km<sup>2</sup>.

Wilayah Kecamatan Deket bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Glagah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Tikung, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Lamongan.

Kecamatan Deket dengan luas wilayah 3,988,08 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 Desa dan 55 Dusun yang terdiri dari 89 RW dan 266 RT.

## **C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, Peraturan Bupati Lamongan nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan dan di perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017 Tugas Pokok Camat sebagaimana dimaksud adalah tentang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. dan Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dibantu oleh perangkat Kecamatan.

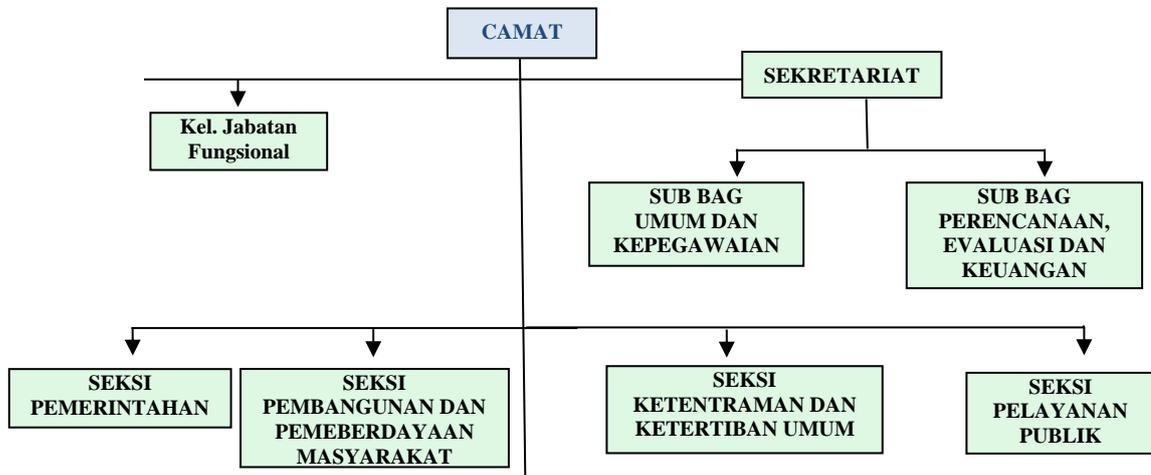
Dalam melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis ,Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKJPJ Kecamatan
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana Operasional berupa petunjuk teknis dan standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, antara lain:
  1. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Deket sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020, terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pelayanan Publik dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di bawah ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**



**3. Jumlah Penduduk**

Kecamatan Deket dengan jumlah 17 Desa dan 55 Dusun 87 RW dan 269 RT. dengan penduduk 43.759 jiwa yang terdiri dari 21.877 laki-laki dan 21.882 perempuan adapun untuk mendukung kelancaran jalannya pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum di Kecamatan Deket telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 85 Tahun 2020 sebagai berikut :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Camat  | : 1 (Difinitif) |
| 2. Sekretaris Kecamatan                         | : 1 (Difinitif) |
| 3. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  | : 1 (Difinitif) |
| 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian                | : 1 (Difinitif) |
| 5. Kasi Pemerintahan                            | : 1 (Difinitif) |
| 6. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | : 1 (Difinitif) |
| 7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum         | : 1 (Difinitif) |
| 8. Kasi Pelayanan Publik                        | : 1 (Difinitif) |

## 1. PERSONIL

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Publik dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, di lingkungan Kantor Kecamatan Deket di dukung 23 (Dua Puluh Tiga) personil sebagaimana daftar berikut ini :

Tabel 1.1								
Data Pejabat Struktural Kecamatan Deket Tahun 2024								
Jabatan Struktural	Eselon				PNS			
	IV		III		GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV
	a	b	a	b				
1. Camat	-	-	1	-	-	-	1	-
- Sekretaris Camat	-	-	-	1	-	-	-	1
- Kasubag	-	2	-	-	-	-	2	
- Seksi Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	1	
- Seksi Pelayanan Publik	1	-	-	-	-	-	1	-
- Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	-	-	1	-
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

Tabel 1.2

### Data Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kecamatan Deket Tahun 2024

#### 1. Jumlah PNS

Kecamatan Deket merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang merupakan tipe C dengan jumlah Karyawan Jabatan Struktural sebanyak 23 orang, Staf PNS sebanyak 17 orang, dan 6 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut :

NO	JABATAN STRUKTURAL	JML	PANGKAT/ GOL.RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Camat	1	Pembina ( IV / a )	1	S-1	1	
2.	Sekcam	1	Pembina ( IV / a )	1	S-2	1	
3.	Kasi	4	Penata Tk. I ( III / d )	4	S-1	4	
4.	Kasubag	2	Penata Tingkat I (III/d)	1	S-1	1	
			Penata (III/c)	1	S-1	1	
5.	Staf	13	Penata (III/c)	2	S-1	2	
			Penata Muda	3	S1/SMA	3	

		Pengatur Tk. I (I/Id)	2	SMA	2	
		Pengatur Muda (I/Ia)	1	SMA	1	
		Juru (I/c)	1	SMP	1	
		Juru (I/c)	1	SD	1	
		Tenaga Kontrak	5	SMA	4	
		Tenaga Kontrak	1	SMP	1	
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>		<b>23</b>	

## 2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang vital dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Deket. Adapun sarana dan prasarana yang dapat disampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel 1.3 Daftar sarana dan prasarana Kecamatan Deket Tahun 2024 di bawah ini :

**Tabel 1.3**

Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Deket Tahun 2024

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Komputer	21	
2	Printer	22	
3	Meja Kerja	25	
5	Meja Tamu	2	
6	Meja Panjang	26	
7	Mesin Ketik	-	
9	Kursi putar	26	
10	Laptop	7	
11	Kursi tamu	11	
12	Kursi Besi	8	
13	Kursi Plastik	45	
14	Dispenser	-	
15	Rak besi	2	
16	Filling cabinet	9	
18	Sound system	2	
20	Kipas angin	6	
21	Handy Cam	1	
22	Proyektor	1	
23	Almari Arsip	3	
25	Tempat tidur	1	
26	Podium	1	
27	Pendopo	1	
28	Simduk	1	
29	Rumah Dinas	1	
30	Kantor Kecamatan	1	
31	Ruang PKK	1	
32	Mobil	1	
33	Sepeda Motor	7	
34.	AC	13	
35.	Kamera digital	2	

### 3. PEMBIAYAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kecamatan Deket mempunyai Anggaran Operasional Kecamatan sebesar Rp. 2.717.310.000.00 yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel 1.4 dibawah ini :

**Tabel 1.4**  
Data Anggaran Operasional Kecamatan Deket Tahun 2024  
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.493.405.000,00</b>	<b>2.544.405.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9.339.800,00	9.339.800,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.274.244.100,00	2.329.174.600,00	APBD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.345.600,00	91.345.600,00	APBD
	Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan	13.400.000,00	17.962.000,00	APBD
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemdes	145.040.000,00	151.040.000,00	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	133.600.000,00	133.597.500,00	APBD
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>9.999.700,00</b>	<b>9.999.700,00</b>	<b>APBD</b>
	Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	9.999.700,00	9.999.700,00	APBD
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>63.596.400,00</b>	<b>63.596.400,00</b>	<b>APBD</b>
	Kegiatan : Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	33.796.400,00	33.796.400,00	APBD
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	29.800.000,00	29.800.000,00	APBD
4	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>9.999.900,00</b>	<b>9.999.900,00</b>	<b>APBD</b>
	Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	9.999.900,00	9.999.900,00	APBD
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>48.999.500,00</b>	<b>43.437.500,00</b>	<b>APBD</b>
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.999.500,00	43.437.500,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.799.655.000,00</b>	<b>2.859.493.000,00</b>	

### 4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Penulisan LKJIP Kecamatan Deket Tahun 2024 disusun dengan Sistematika pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum penyusunan, sistematika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan Deket.

#### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Deket , tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2024.

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut :Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ;

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional (Jika ada)
3. Analisis Kinerja :
  - 3.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
  - 3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
  - 3.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV Penutup**

Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Deket mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2021 – 2026. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 13 Januari 2025, Nomor 000.9.6.3/16/413.032/2025, perihal Penyusunan LKJIP OPD Tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Kecamatan Deket yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

### VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, **Visi** Kabupaten Lamongan adalah : **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”** Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut telah ditetapkan lima **misi** sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah;
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman;
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi.

#### 1. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Deket tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Deket tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Deket;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Deket dalam jangka menengah;

3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Deket yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Deket.

## **2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka kerangka perencanaan pembangunan Kecamatan Deket tahun 2021 - 2026 disusun secara jelas pada setiap misinya, yang menyangkut Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) terlampir.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024**

### **1. Program dan Kegiatan**

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Deket yaitu Sub Urusan Umum dan Urusan Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 2.732.459.500.00- adapun Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.398.420.752.00- atau sebesar (87.78%). Terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah , Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 9.339.800.00- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV adalah sebesar Rp. 9.327.500.00- atau sebesar (99.87%).

2. Administrasi Keuangan, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 2.329.174.600.00 dan Realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.015.480.036.00- atau sebesar (86.53%).
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 91.345.600.00- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 86.430.400.00- atau sebesar (94.62%).
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan dimaksud untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 17.962.000,00- dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 16.200.000,00- atau sebesar (90,19%)
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 151.040.000,00- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 148.731.516.00- atau sebesar (98.47%).
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 133.597.500.00- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 122.251.300.00- atau sebesar (91.51%)

## II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 9.999.700.00- adapun Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.139.500.00- atau sebesar (61.40%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan . Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 9.999.700,00- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.139.500,- atau sebesar (61.40%).

### **III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 63.596.400.00- adapun Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 61.549.000.00- atau sebesar (96.78%). Terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa, Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan dan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 33.796.400,- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 33.749.000,- atau sebesar (99.86%).
2. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 29.800.000,00- dan realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 27.800.000,00- atau sebesar (93,29%).

### **IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 9.999.900,00-adapun realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp.9.921.500,00-atau sebesar (99,22%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 9.999.900,00-dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.921.500,00-atau sebesar (99,22)

### **V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 43.437.500.00- adapun Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.572.000.00- atau sebesar (88.80%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 43.437.500,00- dan Realisasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 38.572.000,00- atau sebesar (88..80%).

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dalam tahun 2024 dengan 5 program dan 10 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Deket tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Perjanjian Kinerja Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana terlampir :

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil capaian kinerja Kecamatan Deket Tahun 2024. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts). Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Deket berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Deket Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan indikator masukan ( **Input** ), keluaran ( **Output** ) dan hasil ( **Outcome** ).

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Deket adalah tercapai rata-rata sebesar **100 %**, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

No	Sasaran		Tahun 2023		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Selaras Yang Tersusun Tepat Waktu	1 Dokumen Evaluasi,1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja	1 Dokumen Evaluasi,1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun dengan baik	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja	100%

No	Sasaran		Tahun 2023		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP	100 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan Akhir Tahun	1 Laporan Akhir Tahun	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	7 jenis	7 jenis	100%
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis/item peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis	9 jenis	100%
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis/item bahan logistik kantor	35 jenis	35 jenis	100%
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang tersedia	12 jenis	12 jenis	100%
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan perundang undangan	12 bulan	12 bulan	100%
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 kegiatan	15 kegiatan	100%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 jenis	2 jenis	100%
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	100%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	2 jenis	100%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor jumlah perbaikan kendaraan dinas/ operational yang terpenuhi	9 unit 9 unit	6 unit 6 unit	66%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	2 jenis	100%
18	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%

No	Sasaran		Tahun 2023		Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
20	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa	17 desa	17 desa	100%
21	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	17 desa	17 desa	100%
22	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
23	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Difasilitasi Dlm Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	17 desa	17 desa	100%
24	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	2 Pelatihan	2 Pelatihan	100%
25	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Diwilayah Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

## 2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Deket antara 2023 dengan 2024 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan, 19 unit, 10 orang, 3 jenis	12 bulan, 19 unit, 10 orang, 3 jenis	-	-

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	Meningkatnya Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	32 jenis, 5 jenis, 13 jenis, 1 jenis, 10 jenis	32 jenis, 5 jenis, 13 jenis, 1 jenis, 10 jenis	-	-
3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pendingin Ruangan yang dicukupi dan Tersedia	10 unit, 14 unit	10 unit, 14 unit	-	-
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	-	-
5	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit	1 unit	-	-
6	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 stel Pakaian Korpri dan 30 stel Pakaian Putih Hitam	30 stel Pakaian Korpri dan 30 stel Pakaian Putih Hitam	-	-
7	Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan OPD yang tersusun	25 Laporan	25 Laporan	-	-
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Tersusun	7 Laporan	7 Laporan	-	-
9	Sarana Prasarana PATEN	Jumlah Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	-	-
10	Pelayanan PATEN	Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Yang Tersedia	7 pelayanan	7 pelayanan	-	-
11	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan Yang Dilaksanakan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	-	-
12	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	-	-
13	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	-	-

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
14	Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES	17 Kali Kegiatan	17 Kali Kegiatan	-	-
15	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	12 Kali Kegiatan	12 Kali Kegiatan	-	-
16	Pendataan UMKM	Jumlah Pendataan UMKM yang produktif dan aktif yang dapat terfasilitasi	17 desa	17 desa	-	-
17	Fasilitasi Kemiskinan	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Kemiskinan	17 desa	17 desa	-	-
18	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pembersihan/ Pengerukan Sungai	4 Kali Kegiatan	4 Kali Kegiatan	-	-
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Selaras Yang Tersusun Tepat Waktu	-	-	1 Dokumen Evaluasi, 1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja	1 Dokumen Evaluasi, 1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun dengan baik	-	-	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA
21	Evaluasi Kiinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	-	-	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	-	-	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	-	-	1 Laporan Akhir Tahun	1 Laporan Akhir Tahun

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	-	-	3 dokumen	3 dokumen
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	-	-	7 jenis	7 jenis
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis/item peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	9 jenis	9 jenis
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis/item bahan logistik kantor	-	-	35 jenis	35 jenis
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	-	-	12 jenis	12 jenis
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan perundang undangan	-	-	12 bulan	12 bulan
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	15 kegiatan	15 kegiatan
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	-	-	2 jenis	2 jenis
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	-	-	2 jenis	2 jenis
33	Penyediaan Jasa	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	2 jenis	2 jenis

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Umum Kantor					
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor jumlah perbaikan kendaraan dinas/ operational yang terpenuhi	-	-	9 unit 9 unit	6 unit 6 unit
35	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	2 jenis	2 jenis
36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-	-	4 kegiatan	4 kegiatan
37	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan
38	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa	-	-	17 desa	17 desa
39	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah kegiatan Pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	17 desa	17 desa

No	Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
40	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah desa difasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan
41	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Difasilitasi Dlm Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	-	17 desa	17 desa
42	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan	-	-	2 Pelatihan	2 Pelatihan
43	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Diwilayah Kecamatan	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Deket antara 2024 dengan target jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :

NO	Sasaran		Target RPJMD 2024	Tahun 2024		Capaian
	Uraian	Indikator		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah	Nilai IKM Layanan Kecamatan	83.22	83.22	83.22	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan	82,20	82.20	82.20	100 %
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	9 Desa	9 Desa	9 Desa	75 %

#### 4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Mempunyai 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan berhasilnya semua kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka kecamatan memiliki pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Karena Komitmen seluruh pegawai Kecamatan Deket atas Pelayanan Publik yang baik, sehingga Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan.

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Deket dapat terus melakukan peningkatan Pelayanan pemberdayaan Masyarakat Desa.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Mempunyai 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub kegiatan dengan berhasilnya program tersebut maka Kantor Kecamatan Deket dapat terus melakukan peningkatan pembinaan tersebut.

➤ **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera.

#### 5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.
- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

- Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

#### **6. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

##### **a) Faktor Keberhasilan**

- Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti
- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik masyarakat maupun pemuda yang ada diwilayah Kecamatan Deket;
- Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

##### **b) Faktor Kegagalan**

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

##### **c) Langkah-Langkah Antisipatif**

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan alokasi APBD;
- Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
- Pendidikan dan pelatihan formal aparaturnya yaitu :
  1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah.
  2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
  3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
  4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
  5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
  6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.339.800,00 terealisasi sebesar Rp. 9.327.500,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.300,00 atau (99,87%) dikembalikan Kas Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.329.174.600,00 terealisasi sebesar Rp 2.015.480.036,00 sehingga ada

- efisiensi anggaran sebesar Rp.313.694.564,00 atau (13,47%) dikembalikan ke Kas Daerah.
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 91.345.600,00 terealisasi sebesar Rp 86.430.400,00 atau (5,38%) dikembalikan ke Kas Daerah.
  - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Desa, dengan pagu sebesar Rp. 17.962.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,00 atau (9,81%) dikembalikan ke Kas Daerah.
  - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 151.040.000,00 terealisasi sebesar Rp 148.731.516,00 atau (1,53%) dikembalikan ke Kas Daerah.
  - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 133.597.500,00 terealisasi sebesar Rp 122.251.300,00 atau (9,49%) dikembalikan ke Kas Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - 1.1. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.844.100,00 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.155.900,00 atau (12,89%) dikembalikan ke Kas Daerah.
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - 1.1. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.862.00,00 atau (0,27%) dikembalikan ke Kas daerah.
    - 1.2. Kegiatan Singkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.841.500,00 terealisasi sebesar Rp. 33.841.500,00
    - 1.3. Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.480.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.050.000,00 atau (65,82%) dikembalikan ke Kas Daerah.
  4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - 1.1. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.292.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau (100%) dikembalikan ke Kas Daerah
  5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1.1 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.502.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.205.000,00 atau (2,27) dikembalikan ke Kas Daerah.
    - 1.2 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau (100%) dikembalikan ke Kas Daerah
    - 1.3 fasilitas Singkronisasi Perencanaan, Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan pagu 20.151.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.791.000,00 atau (1,79%) dikembalikan ke Kas Daerah

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:**

Analisis yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjalannya suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pimpinan, Kasi, Kasubag dan semua Staf dengan didukung Sarana dan Prasarana yang baik serta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, serta mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Kecamatan Deket dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Deket berdasarkan sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Deket dalam mencapai kinerja tahun 2024, menetapkan 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub Kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Deket sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub Kegiatan, tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.

Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.

### B. SARAN

Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Deket dalam bentuk :

1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran dan program sehingga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu :
2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam hal perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitas fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasaranadan pelayanan masyarakat
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-program pemerintah dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( **Good Governance**).

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Lamongan, Januari 2025

CAMAT DEKET



**ARIF BAKTHIAR, S.Sos**

Pembina

NIP. 19811107 200604 1 011



# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA STRATEJIS  
TAHUN 2021-2026**

**Instansi : Kecamatan Deket**

**Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan**

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pelayanan publik yang Inovatif	1. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	IKM Nilai Sakip Kecamatan	1. Meningkatkan nilai IKM 2. Meningkatkan Nilai Sakip Kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	1. Meningkatkan rekomen dari hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Meningkatkan desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM Layanan Kecamatan	79,25	82,60	83,22	83,50	83,52	83,54	83,56	83,62
2	Nilai Sakip Kecamatan	80,11	82,00	82,10	82,10	82,20	82,30	82,40	82,50
3	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	16 %	65%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
4	Jumlah Desa Mandiri	6 Desa	8 Desa	9 Desa	9 Desa	10 Desa	12 Desa	14 Desa	17 Desa

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2024**

**OPD : KECAMATAN DEKET**

Nomor					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai IKM</b>	Kec. Deket	<b>86</b>	<b>2.732.459.500</b>	APBD	<b>86,25</b>	<b>2.800.317.975</b>
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	Kec. Deket	100%	9.339.800	APBD	100%	9.806.790
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang selaras	Kec. Deket	4 Dokumen	9.339.800	APBD	4 Dokumen	9.806.790
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik	Kec. Deket	100%	2.329.174.600	APBD	100%	2.387.956.305
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPJ Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar	Kec. Deket	14 Laporan	2.310.495.600	APBD	14 Laporan	2.368.343.355
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Kec. Deket	14 Laporan	9.339.500	APBD	14 Laporan	9.806.475
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kec. Deket	14 Laporan	9.339.500	APBD	14 Laporan	9.806.475
7	01	01	2.05		Administrasi Perangkat Daerah Umum	Persentase Administrasi Umum yang terlaksanakan	Kec. Deket	100%	91.345.600	APBD	100%	95.912.880

7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian barang Penyediaan	Kec. Deket	140 Item	6.062.000	APBD	100%	6.365.100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	Kec. Deket	3 Jenis	25.997.600	APBD	3 Jenis	27.297.480
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kec. Deket	2 jenis	22.148.000	APBD	4 jenis	23.255.400
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan perundang-undangan	Kec. Deket	2 jenis	6.888.000	APBD	2 jenis	7.232.400
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kec. Deket	400 dus	30.250.000	APBD	300 dus	31.762.500
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>2 Item</b>	<b>17.962.000</b>	<b>APBD</b>	<b>2 Item</b>	<b>14.070.000</b>
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Deket	2 Item	17.962.000	APBD	2 Item	14.070.000
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>100%</b>	<b>150.040.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>152.292.000</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Kec. Deket	2 Jenis	32.200.000	APBD	4 Jenis	28.560.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan	Kec. Deket	2 Jenis	10.000.000	APBD	2 Jenis	10.500.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor	Kec. Deket	5 Orang	107.840.000	APBD	5 Orang	113.232.000
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>100%</b>	<b>133.597.500</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>140.280.000</b>

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Deket	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	3.600.000	APBD	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	3.780.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec. Deket	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	29.997.500	APBD	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	31.500.000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang di laksanakan	Kec. Deket	1 Gedung	100.000.000	APBD	1 Gedung	10.500.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>100%</b>	<b>9.999.700</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>10.499.685</b>
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kec. Deket	100%	9.999.700	APBD	100%	10.499.685
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan Publik yang di laksanakan	Kec. Deket	3 Jenis	9.999.700	APBD	3 Jenis	10.499.685
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>100%</b>	<b>63.596.400</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>66.776.220</b>
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan	Kec. Deket	100%	33.796.400	APBD	100%	35.486.220
7	01	03	2.01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam musrenbangdes	Kec. Deket	17 Desa	13.797.100	APBD	17 Desa	14.486.955

7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan sinkronisasi	Kec. Deket	17 Desa	9.999.500	APBD	17 Desa	10.499.475
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina	Kec. Deket	3 Pembinaan	9.999.800	APBD	3 Pembinaan	10.997.950
7	01	03	2.06		<b>pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan</b>	<b>Jumlah desa yang diberdayakan dan disehaterahkan</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>17 Desa</b>	<b>29.800.000</b>	<b>APBD</b>	<b>17 Desa</b>	<b>31.290.000</b>
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Deket	17 Desa	29.800.000	APBD	17 Desa	31.290.000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>10.499.895</b>
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kec. Deket	100%	9.999.900	APBD	100%	10.499.895
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah desa yang Melakukan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Deket	17 Desa	9.999.900	APBD	17 Desa	10.499.895
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Naik Kelas</b>	<b>Kec. Deket</b>	<b>23,53%</b>	<b>44.437.500</b>	<b>APBD</b>	<b>23,81%</b>	<b>514.499.475</b>
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Deket	100%	44.437.500	APBD	100%	51.449.475

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Deket	17 Desa	9.999.800	APBD	17 Desa	10.499.790
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Deket	17 Desa	10.000.000	APBD	17 Desa	10.500.000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kec. Deket	17 Dokumen	10.000.000	APBD	17 Desa	10.500.000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Deket	17 Desa	8.999.700	APBD	17 Desa	9.449.685
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang berkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan	Kec. Deket	8 Desa	5.438.000	APBD	8 Desa	10.500.000
<b>Total</b>									<b>2.859.493.000</b>			<b>2.950.042.935</b>

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2023**

**OPD : KECAMATAN DEKET**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PAGU	REALISASI DAN CAPAIAN	KET.
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					Rp2.732.459.500	Rp2.398.420.752 87,78%		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan	100 %	100 % Realisasi : 1 Dok Renstra, Renja, 1 Dokumen RKA, 3 Dok Evaluasi	Rp9.339.800	Rp9.327.500 99,87%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik	100 %	100 % Realisasi : 14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP, 12 Laporan Bulanan, 4 laporan Tribulanan, 2 lap semester	Rp2.329.174.600	Rp2.015.480.036 86,53%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksanakan	100 %	100 % Realisasi: 7 jenis komponen listrik, 9 jenis peralatan rumah tangga, 35 jenis logistik kantor, 12 Bulan bahan bacaan, 15 Kegiatan rapat koordinasi	Rp91.345.600	Rp86.430.400 94,62%		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 % Realisasi: 2 jenis rekening air dan listrik, 2 jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor, 2 jenis jasa pelayanan umum kantor	Rp17.962.000	Rp16.200.000 90,19%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 % Realisasi: 3 unit pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor, 1 Jenis pemeliharaan dan rehabilitasi	Rp 151.040.000	Rp 148.731.516 98,47%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penjunagan urusan pemerintahan		100 % Realisasi : Pengadaan Peralatan dan mesin, Alat kantor, Rumah tangga dan Alat Pendingin	Rp 133.597.500	Rp122.251.300 91,51%	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		100 % Realisasi : Pembelian ATK, Kertas, Bahan Cetak, Belanja Modal peralatan dan Mesin	Rp 9.999.700	Rp 6.139.500 61,40%	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan	100 %	100 % Realisasi : 4 Kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Rp. 40.000.000	Rp. 34.844.100 87.11 %	

4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 % Realisasi: 2 kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Rp 74.221.500	Rp. 56.753.500 76.47%	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100% Realisasi : 17 desa yang difasilitasi pembinaannya	Rp. 56.945.000	Rp. 30.996.000 54.43%	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2024**

**OPD : KECAMATAN DEKET**

NO	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN KEGIATAN		SASARAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN
	UTAMA			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat	IKM	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1 Dok Renstra, Renja, 1 Dokumen RKA, 3 Dok Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi, 1 Dokumen Renstra, 1 Dokumen Renja	Rp 9.339.800
				<b>Administrasi Keuangan</b>	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP, 12 Laporan Bulanan, 4 laporan Tribulanan, 2 lap semester	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 SPJ Gaji Dan 12 Spj TPP	Rp 2.310.495.600
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Akhir Tahun	Rp 9.339.500

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 dokumen	Rp 9.339.500
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 jenis komponen listrik, 9 jenis peralatan rumah tangga, 35 jenis logistik kantor, 12 Bulan bahan bacaan, 15 Kegiatan rapat koordinasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140 Item	Rp 6.062.000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Jenis	Rp 25.997.600

						Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2 jenis	Rp 22.148.000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	Rp 6.888.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 dus	Rp 30.250.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	Rp 17.962.000

				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 jenis rekening air dan listrik, 2 jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor, 2 jenis jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 jenis	Rp 32.200.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 jenis	Rp 10.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2 jenis	Rp 107.840.000	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 unit pajak kendaraan bermotor, 1 Unit Mobil dan pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit mobil	Rp 3.600.000	
						dan 7 Unit sepeda Motor		
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	2 jenis	Rp 29.997.500	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	Rp 100.000.000		

2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Pembelian ATK, Kertas, Bahan Cetak, Belanja Modal peralatan dan Mesin	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Jenis	Rp 9.999.700
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	Presentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	4 Kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	17 Desa	Rp 13.797.100
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Desa	Rp 9.999.500
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Pembinaan	Rp 9.999.800

				<b>pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan</b>		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Rp 29.800.000
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	2 kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2 Kegiatan	Rp 9.999.900
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatnya Jumlah Koordinasi Dan Pembinaan Di Bidang Pemerintahan, Keamanan Dan Ketertiban, Sosial Dan Pembangunan Wilayah	Prosentase Koordinasi Dan Pembinaan Di Bidang Pemerintahan, Keamanan Dan Ketertiban, Sosial	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	17 desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa, 17 kegiatan Pengelolaan keuangan desa dan kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan , daerah dengan pembangunan desa,4 kegiatan dlm Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 2 kegiatan pelatihan pemberdayaan	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	17 Desa	Rp 9.999.800
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Desa	Rp 10.000.000	
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Dokumen	Rp 10.000.000	

					masyarakat diwilayah kecamatan, 2 koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17 Desa	Rp 8.999.700
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 Desa	Rp 5.438.000